



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama oleh Hakim Tunggal dalam sidang terpadu, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Sairing bin Abd. Hamid, Umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,

bertempat tinggal di Desa Tinabogan, Kecamatan Dondo,

Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Rosmiati binti Hi. Ali, Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan

URT,

bertempat tinggal di Desa Tinabogan, Kecamatan Dondo,

Kabupaten Tolitoli selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

II; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II; Telah memeriksa alat-alat bukti serta di persidangan;

DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon

I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 8 Maret 2016 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli tanggal 8 Maret 2016 dengan Nomor 0283/Pdt.P/2016/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 13 Mei 1993, di Desa Tinabogan, Kecamatan

Hal. 1 dan 13 Penetapan. No. 0283/Pdt.P/2016. /PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dondo, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat didalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah dan tidak pula sesusuan, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Tinabogan yang bernama Moh. Yunus , wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Hi AH Hi Abd Halim sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Montang dan Ahmad dengan mahar 50 pohon kelapa tunai;
3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka sedang Pemohon II adalah perawan dan sampai sekarang tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;
4. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonan ini adalah untuk memperoleh pengesahan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
6. Bahwa pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini;

Hal. 2 dari 13 Penetapan. No .0283/Pdt.P/2016 ./PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian/dali-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua

Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk memutus dengan putusan sebagai berikut: PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 1993, di Desa Tinabogan, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli;
3. Menetapkan Biaya Perkara menurut Hukum ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut: Saksi Pertama :

Saharudin bin Laperu Hi Pattarai, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan

Petani, tempat tinggal di Desa Tinabogan, Kecamatan Dondo,

Kabupaten Tolitoli; Saksi tersebut di persidangan mengaku tetangga

Pemohon telah

Hal. 3 dan 13 Penetapan. No .0283/Pdt.P/2016. /PA 77/



memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi menyaksikan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 Mei 1993, di Desa Tinabogan;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa;
 - Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada dua orang saksi; Bahwa mahar nikah dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka , dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab

ataupun hubungan sesusuan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan Pemohon II bercerai;

Bahwa tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon I dan Pemohon II keluar dari agama Islam;

Bahwa tidak pernah melihat ataupun mendengar ada orang lain yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II; Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah; Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku

Hal. 4 dari 13 Penetapan. No .0283PdtP/2016. /PA77/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nikah dalam kelengkapan administrasi kependudukan dan keperluan akta

kelahiran; **Saksi Kedua :**

Ahmad bin Hi. Abd. Halim, umur 67 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani,
tempat tinggal di Desa Tinabogan, Kecamatan Dondo, Kabupaten
Tolitoli;

Saksi tersebut di persidangan mengaku sepupu Pemohon telah
memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya
(Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi menyaksikan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 Mei 1993,



di Desa Tinabogan;

- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada dua orang saksi;
- Bahwa mahar nikah dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus
jejaka , dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan
nasab ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang
anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan
Pemohon II

Hal. 5 dan 13 Penetapan. No .0283/Pdt.P/2016. /PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bercerai;
putu

- Bahwa tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon I dan Pemohon II keluar dari agama Islam;
- Bahwa tidak pernah melihat ataupun mendengar ada orang lain yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dalam kelengkapan administrasi kependudukan dan keperluan akta kelahiran; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon

menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian

mengajukan jsimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan alat

bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam program Pelayanan Terpadu, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada

Hal. 6dari 13 Penetapan. No .0283/Pdt.P/2016. /PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paparan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli sebanyak satu kail pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Admininstrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 145, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dibenarkan, namun

arena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus Akta Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah disebabkan perkawinan mereka (Pemohon I dengan Pemohon II) tidak terdaftar di KUA setempat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi keduanya telah datang secara langsung di persidangan dan telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, dan keterangan keduanya relevan dan mendukung kebenaran dalil-dalil para Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 13 Mei 1993, di Desa Tinabogan, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli yang menikahkan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Tinabogan yang bernama Moh. Yunus , wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Hi Ali Hi Abd Halim sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Montang dan Ahmad dengan mahar 50 pohon kelapa tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I status adalah jejaka sedangkan Pemohon II status adalah perawan, serta setelah menikah belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 8 dari 13 Penetapan. No M83/Pdt.P/2016. /PATH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putu • Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*bakdaddukhul*) dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut wali menikahkan Pemohon I dan Pemohon II serta dihadiri oleh 2 orang saksi laki-laki yang aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat wali dan saksi nikah sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 13 Penetapan. No .0283/Pdt.P/2016. /PA.TII



M. n fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan
enimb Pemohon II telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1)
ang, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat
bahw (1) Kompilasi Hukum Islam;

a Menimbang, bahwa pada saat ijab qabul, Pemohon I telah
pernik menyerahkan kepada Pemohon II mahar dibayar tunai, fakta mana berarti
ahan telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi
Pemo Hukum Islam;

hon I Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan
denga ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar
n dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan
Pemo perihal status keduanya sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan
hon II fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon
didas II tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

ari Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
oleh tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan
perset Pemohon II adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam
ujian karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak
kedua terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan
belah ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
pihak, Perkawinan, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan
maka sebagai pernikahan yang sah;

berda Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak
sarka tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang,



sehingga untuk kepastian hukum dan guna kepentingan pencatatan perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim menilainya sebagai indikasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syart yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Sairing bin Abd. Hamid) dengan Pemohon II (Rosmiati binti Hi. Ali) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 1993, di Desa Tinabogan, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli;
3. Memerintahkan Pemohon I dan II untuk melaporkan pemikahannya pada

Hal 11 dari 13 Penetapan. No .0283Pdt.P/2016. PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli untuk

p

dicatatkan; 4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk

membayar biaya

perkara ini sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu

rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang terpadu pada hari Senin

tanggal 11 April 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1437

Hijriyah. oleh **Arief Rahman, SH** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid**

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan

Pemohon II;

Hakim Tunggal ttd

Arief Rahman, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | Rp. 50.000,- |
| | | Rp. 100.000,- |
| | | Rp. 5.000,- |
| | | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 191.000,- | |
| | (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) | |
| 4. Biaya redaksi | | |

Hal. 12 dan 13 Penetapan. No .0283/Pdt.P/2016. /PATH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WAKIL PANITERA PENGADILAN AGAMA Tolitoli,
5

Usman Abu, S.Ag.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)